

## PERBANDINGAN EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH

I Gede Oka Dhananjaya B.<sup>1</sup>  
Ni Made Adi Erawati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia  
email: [tugas\\_okadhanan@yahoo.com](mailto:tugas_okadhanan@yahoo.com) / Telp: +62 85 73 75 25 428

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak daerah pada pendapatan asli daerah di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung dan untuk mengetahui perbedaan efektivitas dan kontribusi pajak daerah pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung pada tahun 2009-2013. Sesuai hasil analisis diketahui, rasio efektivitas untuk Kota Denpasar dan Kabupaten Badung dalam penerimaan pajak daerah tergolong dalam kategori sangat efektif. Analisis kontribusi penerimaan pajak daerah pada Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung pada tahun 2009-2013 selalu berfluktuasi dan rata-rata tingkat kontribusi pajak daerah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung selama lima tahun terakhir dalam kategori sangat baik. Tidak ada perbedaan rasio efektivitas dalam penerimaan pajak daerah antara Kota Denpasar dan Kabupaten Badung pada tahun 2009-2013, tetapi terdapat perbedaan kontribusi penerimaan pajak daerah pada Pendapatan Asli Daerah antara Kota Denpasar dan Kabupaten Badung tahun 2009-2013.

**Kata Kunci:** efektivitas, kontribusi, pajak daerah, pendapatan asli daerah

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to uncover the effectiveness and the contribution of local taxes in the local revenue in the city of Denpasar and Badung district and to know the difference was the effectiveness and the contribution of local taxes on a local revenue in the city of Denpasar and district Badung 2009-2013. Based on the results analysis was known the ratio of the effectiveness of Denpasar to town and district Badung in tax revenues areas classified as very effective. An analysis of the contribution of local tax revenue in Denpasar local revenue city and district years 2009-2013 Badung always fluctuating and the average level of the contribution of local tax and city Denpasar Badung district during the past five years in the category of very good. There is no difference in the ratio of the effectiveness of local tax revenue between the city and district Denpasar Badung 2009-2013, years but there were differences contribution tax receipts on a local revenue Denpasar between the city and district Badung 2009-2013.*

**Keywords:** effectiveness, contribution, regional taxes, local revenue

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan reformasi menciptakan peluang untuk kemajuan paradigma pembangunan nasional kearah paradigma pemerataan pembangunan yang adil dan berimbang. Dalam mewujudkan perbedaan paradigma dapat dilakukan dengan kebijakan otonomi daerah serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai UU No. 22 th 1999 mengenai perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pajak adalah salah satu kewajiban masyarakat kepada negara dan merupakan wujud partisipasi masyarakat untuk pembangunan negara. Walaupun pajak memiliki sifat memaksa tetapi terdapat aturan dalam pengenaan serta pemungutan pajak oleh negara. Dalam mewujudkan kebijakan otonomi daerah sangat bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai aktivitas pembangunan daerah tersebut, maka Pemerintah Daerah perlu berupaya meningkatkan pendapatan yang diperoleh untuk menambah persediaan keuangan daerah demi segala aktivitas pembangunan daerah (Kesek,2013).

Sesuai dengan ketentuan umum pada UU No. 22 Th 1999 kemudian diubah menjadi UU No. 32 Th 2004 dan selanjutnya diubah kembali menjadi UU No. 28 Th 2009 tentang pemerintahan daerah, Otonomi daerah merupakan wewenang serta kewajiban daerah otonom dalam mengatur dan mengelola sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Diterapkannya Otonomi Daerah memberikan kebebasan Pemerintah Daerah untuk berinisiatif mengatur dan memaksimalkan sumber daya daerah, hal itu menjadi dasar daerah untuk bisa bergerak sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Otonomi daerah juga dapat memberikan dampak yang positif bagi perkembangan ekonomi rakyat hal ini diakibatkan karena adanya harapan baru untuk memperoleh kebijakan daerah

demi memperjuangkan nasib rakyat. Sebab adanya otonomi daerah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung akan lebih mudah mengatur urusan pemerintahannya sendiri yang telah diatur Undang-undang. Keuntungannya dapat lebih giat lagi untuk melakukan pembenahan dan pembangunan fasilitas umum dari hasil pemungutan pajak daerahnya. Namun pelaksanaan pembangunan daerah sering terkendala keterbatasan dana akibat pemberlakuan UU Otonomi Daerah untuk aktif menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial dan meminimalkan ketergantungan bantuan pusat (Hoque,2008).

Kendala yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah tingkat kesiapan keuangan yang berbeda pada setiap daerah. Kebijakan otonomi daerah adalah kebijakan yang menguntungkan daerah-daerah yang mempunyai sumber daya potensial namun bagi daerah yang kurang memiliki sumber daya potensial menganggap kebijakan otonomi daerah merupakan kebijakan yang tidak menguntungkan (Norregaard,2013). Penelitian Pepinsky (2008) dan Aragon (2009) menjelaskan bahwa pemerintah daerah memperoleh dana paling besar dari pajak daerah dan pemerintah pusat.

Setiap daerah otonom dalam hal ini provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia, memiliki sumber daya alam dan potensi ekonomi yang bervariasi, sehingga jika dimanfaatkan dengan optimal maka akan mampu berkontribusi lebih signifikan, dalam penerimaan pendapatan asli daerah dengan tujuan memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan pendapatan asli daerah, yang pada tujuannya akan memberikan manfaat dalam pembangunan daerah (Poulson,2008).

Kota Denpasar dan Kabupaten Badung merupakan daerah otonom yang menyelenggarakan dan melakukan pembangunan yang membutuhkan ketersediaan dana yang besar, maka dari itu Pemerintah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung perlu memaksimalkan sumber-sumber penerimaan daerah. Kota Denpasar dan Kabupaten Badung yang memiliki sumber pendapatan daerah yang cukup banyak yang berasal dari dana pajak daerah yang fungsinya agar dapat lebih meningkatkan sistem dan mekanisme pembangunan daerah otonom. Dan apabila adanya pembangunan daerah atau pembaharuan fasilitas-fasilitas umum tiap daerah otonom dapat menggunakan dana yang berasal dari pungutan pajak daerahnya masing-masing. PAD merupakan pendapatan yang didapat daerah yang berasal dari hasil pajak daerah dan pemungutannya sesuai peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Kota Denpasar dan Kabupaten Badung melakukan berbagai upaya yang dipandang penting agar pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan target yang telah disesuaikan oleh peraturan daerah masing-masing, maka dari itu Kota Denpasar dan Kabupaten Badung mengalokasikan pajak daerah untuk pembangunan daerah, yang berfungsi membiayai berbagai urusan pemerintahan di setiap tahunnya. Dana dari pajak daerah selalu diawasi agar dapat terealisasi tepat pada sasaran karena pungutan pajak daerah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung cukup besar.

**Tabel 1.**  
**Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dari Tahun 2008-2012 (dalam ribuan rupiah)**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Badung	449,674,873	850,170,021	979,241,565	1,406,298,000	1,870,187,200
Denpasar	176,072,308	215,156,916	257,899,899	424,959,413	511,326,621
Gianyar	96,922,244	112,380,710	153,617,895	175,273,316	261,222,178
Tabanan	87,379,829	93,840,478	107,836,348	141,046,017	183,295,007
Buleleng	52,662,170	63,487,192	86,962,002	109,167,026	129,003,995
Karangasem	43,005,827	47,842,960	62,696,409	129,556,195	144,019,629
Klungkung	29,028,565	29,566,917	31,331,319	40,735,839	48,561,525
Jembrana	21,235,505	33,952,879	34,380,823	41,330,606	46,470,111
Bangli	12,655,751	16,329,747	16,252,951	22,961,237	40,751,050

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015 (data diolah)*

Berdasarkan Tabel 1 diatas menjelaskan bahwa dari tahun 2008-2012 PAD Badung terus berada paling teratas dan Denpasar berada nomor dua diantara Kabupaten kota di Provinsi Bali. Sebagai daerah otonomi di Provinsi Bali yang memiliki kemampuan daerah dalam berbagai sektor, Kota Denpasar dan Kabupaten Badung memerlukan dana yang cukup besar dalam pembiayaan sistem pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerahnya masing-masing. Salah satu sumber-sumber PAD terbesar untuk Kota Denpasar dan Kabupaten Badung bersumber dari pajak daerah. Penerimaan untuk pajak daerah di Kota Denpasar terus melampaui target dari tahun 2009 sampai tahun 2013 begitu pula untuk di Kabupaten Badung penerimaan pajak daerah selalu melebihi target yang dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

**Tabel 2.**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Denpasar Tahun 2009-2013 (dalam rupiah)**

Tahun	Kota Denpasar		Kabupaten Badung	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2009	20,050,000,000	146,077,325,516	697,877,139,532	722,747,557,685
2010	145,400,000,000	169,581,414,716	848,068,920,466	877,363,357,555
2011	246,800,000,000	326,282,111,699	1,052,902,867,000	1,281,693,418,862
2012	298,600,000,000	377,247,592,363	1,587,437,906,151	1,685,614,025,655
2013	450,258,600,000	504,981,564,103	1,828,670,033,670	2,010,554,251,067

*Sumber: Laporan Target dan Realisasi Kota Denpasar, 2015*

Berdasarkan Tabel 2 terlihat yaitu realisasi dari penerimaan pajak daerah di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung selalu berada diatas target. Seperti pada tahun 2009 penerimaan pajak daerah di Kota Denpasar sebesar Rp 146.077.325.516,- dari yang ditargetkan sebesar Rp 120.050.000.000,-. Begitu pula untuk Kabupaten Badung pada tahun 2013 menargetkan dapat memungut pajak daerah sebesar Rp 1.828.670.033.670,- tetapi yang dapat terealisasi sejumlah Rp 2.010.554.251.067,- Hal tersebut menimbulkan ketertarikan untuk meneliti rasio efektivitas pajak daerah dan kontribusinya pada PAD, apakah dalam penerimaan pajak daerah dari kedua daerah yang selalu memenuhi target ini sudah dilakukan secara efektif dan melihat apakah terdapat perbedaan dalam efektivitas dan kontribusi pajak daerah pada PAD.

Sama halnya dengan daerah-daerah di Negara Indonesia, Kota Denpasar dan Kabupaten Badung diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri pusat pemerintahannya atau memiliki hak otonomi untuk dapat melakukan pembangunan daerah yang lebih kompetitif, agar sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah tersebut dapat dikembangkan, yang kedepannya mampu meningkatkan citra daerah otonom sehingga lebih memaksimalkan PAD

daerahnya, dengan salah satu upaya yang dilakukan yaitu penerimaan pajak daerah.

Selain karena alasan tersebut, penelitian ini juga didasarkan pada belum ditemukannya penelitian tentang perbandingan efektivitas pajak daerah dan kontribusinya. Penelitian sebelumnya lebih cenderung meneliti satu lokasi saja dan objek yang diteliti lebih banyak tentang pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir dan pajak bumi dan bangunan. Salah satu penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Indriani (2010) yang melakukan penelitian yang berjudul Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2007-2009.

Kesek (2013) melakukan penelitian yang berjudul Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Angreini (2008) yang meneliti tentang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah pada Kabupaten Nganjuk. Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2013) yang berjudul Analisis Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dari hasil penelitian sebelumnya tersebut belum ada peneliti yang meneliti perbandingan efektivitas dan kontribusi pajak daerah pada Pendapatan Asli Daerah, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti efektivitas dan kontribusi pajak daerah pada PAD di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung karena Kabupaten Badung dan Kota Denpasar selalu menduduki posisi pertama dan kedua dalam penerimaan PAD di Provinsi Bali setiap tahunnya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang didapat dari penelitian ini yaitu.

- 1) Apakah terdapat perbedaan efektivitas penerimaan pajak daerah di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung?
- 2) Apakah terdapat perbedaan tingkat kontribusi penerimaan pajak daerah di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung?

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan yang dapat dijelaskan dalam penelitian ini yaitu.

- 1) Untuk mengetahui perbedaan efektivitas penerimaan pajak daerah Kota di Denpasar dan Kabupaten Badung.
- 2) Untuk mengetahui perbedaan besarnya tingkat kontribusi penerimaan pajak daerah di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Otonomi daerah adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah atas hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan ketentuan umum di Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Daerah otonomi merupakan kesatuan hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan dari masyarakat setempat sesuai gagasan sendiri berdasarkan dukungan masyarakat. Penerapan otonomi daerah bertujuan mengembangkan potensi ekonomi yang terdapat di daerah, untuk memicu potensi daerah demi peningkatan perekonomian daerah.



Pajak Daerah merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat dipaksakan yang sesuai atas peraturan perundang-undangan yang berlaku yang fungsinya untuk pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu.

H<sub>1</sub> : Tidak terdapat perbedaan efektivitas penerimaan pajak daerah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung tahun 2009-2013.

H<sub>2</sub> : Tidak terdapat perbedaan kontribusi pajak daerah pada PAD Kota Denpasar dan Kabupaten Badung Tahun 2009-2013.

## **METODE PENELITIAN**

Dipilihnya lokasi penelitian ini disebabkan Kota Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali yang merupakan pusat dari berbagai kegiatan seperti pusat pemerintahan, perekonomian, dan juga pendidikan, sehingga dibutuhkan pendapatan atau kemampuan daerah yang terus meningkat untuk melaksanakan pembangunan Kota Denpasar yang terus berkesinambungan. Sudah menjadi tugas Dinas Pendapatan Kota Denpasar untuk mengkoordinasikan target penerimaan pajak daerah serta merealisasikannya bersama dengan unit satuan kerja terkait agar dapat digunakan untuk membiayai rencana kegiatan yang sudah ditetapkan.

Objek dari penelitian ini adalah kinerja dari Kantor Dinas Pendapatan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung berdasarkan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dan besarnya tingkat kontribusi penerimaan pajak daerah pada Pendapatan

Asli Daerah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, dalam penelitian ini adalah gambaran umum Dinas Pendapatan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung mengenai tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, visi dan misi, dan penjelasan-penjelasan lainnya terkait dengan penelitian. Dan data kuantitatif dalam penelitian ini adalah data penerimaan PAD, data realisasi penerimaan pajak daerah, data target dan realisasi pajak daerah pada PAD Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Sumber data dari penelitian ini berupa data sekunder. Yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, (orang lain atau dokumen), berupa data mengenai efektivitas penerimaan Pajak Daerah serta kontribusinya pada PAD Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, serta gambaran umum Dinas Pendapatan Kota Denpasar yaitu mengenai tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, uraian masing-masing jabatan struktural, serta visi dan misi

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi non partisipan. Teknik analisis data analisis kuantitatif dan uji statistik. Uji statistik pertama yang dilakukan adalah pengujian normalitas sebaran data yang dalam penelitian ini menggunakan uji *Shapiro-Wilk*. Jika sebaran data telah diketahui berdistribusi normal, selanjutnya adalah pengujian hipotesis dengan uji beda menggunakan *independent sampel t-test*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Analisis tingkat efektivitas dapat diukur dengan menggunakan rasio efektivitas, yaitu dengan cara melakukan perbandingan realisasi biaya dalam

pemungutan pajak daerah dengan anggaran target biaya dalam pemungutan pajak daerah.

Kriteria rasio efektivitas dapat diukur menggunakan persentase apabila persentase di atas 100 persen berarti sangat efektif, persentase 91-100 persen berarti efektif, persentase 81-90 persen berarti cukup efektif, persentase 61-80 persen berarti kurang efektif, dan persentase kurang dari 60 persen berarti tidak efektif. Perhitungan rasio efektivitas dari kinerja hasil penerimaan pajak daerah di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung tahun 2009-2013 disajikan Tabel 3 berikut.

**Tabel 3.**  
**Rasio Efektivitas Atas Penerimaan Pajak Daerah di Kota Denpasar**  
**2009-2013**

Kota Denpasar			
Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Rasio Efektivitas
2009	120,050,000,000	146,077,325,517	122%
2010	145,400,000,000	169,581,414,716	117%
2011	246,800,000,000	326,282,111,699	132%
2012	298,600,000,000	377,247,592,363	126%
2013	450,258,600,000	504,981,564,104	112%
<b>Rata-Rata</b>	<b>252,221,720,000</b>	<b>304,834,001,680</b>	<b>122%</b>

Sumber: *Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar, 2015 (data diolah)*

Tabel 3 menunjukkan rata-rata rasio efektivitas Kota Denpasar sebesar 122 % yang tergolong dalam kategori sangat efektif sebab nilai rasio diatas 110%.

**Tabel 4.**  
**Rasio Efektivitas Atas Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Badung**  
**2009-2013**

Kabupaten Badung			
Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Rasio Efektivitas
2009	697,877,139,532	722,747,557,686	104%
2010	848,068,920,466	877,363,357,555	103%
2011	1,025,902,887,000	1,281,693,418,863	122%
2012	1,587,437,906,151	1,585,614,025,665	100%
2013	1,626,670,033,670	2,010,554,251,067	124%
<b>Rata-Rata</b>	<b>1,162,591,377,364</b>	<b>1,295,594,522,165</b>	<b>110%</b>

Sumber: *Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, 2015 (data diolah)*

Tabel 4 menunjukkan rata-rata rasio efektivitas Kabupaten Badung Tahun 2009-2013, hal menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah yaitu sebesar 110%, yang tergolong sangat efektif, sebab nilai rasio menunjukkan diatas 100%.

Analisis kontribusi pajak daerah adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat kontribusi yang dapat diberikan dari hasil pemungutan pajak daerah pada PAD, dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan PAD. Perhitungan dari kontribusi pajak daerah pada PAD di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung tahun 2009-2013 ditunjukkan pada Tabel 4 berikut.

**Tabel 5.**  
**Perhitungan Analisis Kontribusi Pajak Daerah pada PAD Kota Denpasar**  
**2009-2013**

Tahun	Penerimaan PAD (Rp)	Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Analisis Kontribusi
2009	215,156,916,393	146,077,325,517	68%
2010	260,482,616,201	169,581,414,716	65%
2011	424,959,412,894	326,282,111,699	77%
2012	511,326,621,036	377,247,592,363	74%
2013	658,970,207,436	504,981,564,104	77%
<b>Rata-Rata</b>	<b>414,179,154,792</b>	<b>304,834,001,680</b>	<b>74%</b>

Sumber: *Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar, 2015 (data diolah)*

Berdasarkan Tabel 5 diatas dapat dilihat pencapaian tingkat kontribusi Kota Denpasar tahun 2009-2013 sebesar 74% namun secara keseluruhan, rata-rata

tingkat kontribusi pajak daerah pada PAD di Kota Denpasar lima tahun terakhir termasuk dalam kategori sangat baik.

**Tabel 6.**  
**Perhitungan Analisis Kontribusi Pajak Daerah pada PAD Kota Denpasar dan Kabupaten Badung Tahun 2009-2013**

Tahun	Penerimaan PAD (Rp)	Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Analisis Kontribusi
2009	796,879,516,015	722,747,557,686	91%
2010	979,241,585,350	877,363,357,555	90%
2011	1,406,835,182,181	1,281,693,418,863	91%
2012	1,888,996,893,913	1,585,614,025,655	84%
2013	2,279,160,796,461	2,010,554,251,067	88%
<b>Rata-Rata</b>	<b>1,470,222,794,784</b>	<b>1,295,594,522,165</b>	<b>88%</b>

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, 2015 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 6 diatas dapat dilihat pencapaian tingkat kontribusi Kota Denpasar tahun 2009-2013 sebesar 88% namun secara keseluruhan, rata-rata tingkat kontribusi pajak daerah pada PAD di Kabupaten Badung lima tahun terakhir termasuk dalam kategori sangat baik. Tetapi berdasarkan tabel 5 dan 6 dapat dilihat adanya fluktuasi hasil pencapaian tingkat kontribusi dari pajak daerah pada PAD Kota Denpasar dan Kabupaten.

Pengujian hipotesis dari penelitian ini memakai Uji beda *t-test* dengan menggunakan bantuan program yaitu *SPSS 15.00 for Windows*.

**Tabel 7.**  
**Ringkasan Uji Beda *t-test* Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah pada PAD**

	Asymp. Sig. (2-tailed)
Rasio Efektivitas Pajak Daerah	0,113
Analisis Kontribusi Pajak Daerah	0,001

Sumber: Data Diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 7 di atas, diketahui bahwa nilai probabilitas rasio efektivitas untuk pajak daerah adalah 0,113. Dengan menggunakan uji dua sisi maka nilai probabilitas dan taraf kepercayaan dibagi 2, maka nilai probabilitas

$0,113/2 = 0,0565$  ini lebih besar dari  $0,05/2=0,025$  ( $0,0565 > 0,025$ ). Hipotesis pertama yang berbunyi tidak terdapat perbedaan efektivitas pajak daerah antara Kota Denpasar dengan Kabupaten Badung tahun 2009-2013 diterima.

Pada tabel 7 di atas, diketahui bahwa nilai probabilitas rasio efektivitas untuk pajak daerah yaitu 0,001. Dengan memakai uji dua sisi maka nilai probabilitas dan taraf kepercayaan dibagi 2, maka nilai probabilitas  $0,001/2 = 0,0005$  ini lebih besar dari  $0,05/2=0,025$  ( $0,0005 > 0,025$ ). Hipotesis kedua yang berbunyi tidak terdapat perbedaan kontribusi pajak daerah pada PAD antara Kota Denpasar dengan Kabupaten Badung tahun 2009-2013 ditolak. Hal ini dikarenakan hasil analisis kontribusi pajak daerah pada PAD dari kedua pusat pemerintahan tersebut terdapat kesenjangan yang cukup jauh. Rata-rata analisis kontribusi pajak daerah pada PAD Kota Denpasar sebesar 74% tetapi untuk Kabupaten Badung sebesar 88%.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Perbandingan penerapan rasio efektivitas di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung dalam penerimaan pajak daerah dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rasio efektivitas dalam penerimaan pajak daerah antara Kota Denpasar dengan Kabupaten Badung Tahun 2009-2013. Terdapat perbedaan kontribusi pajak daerah pada PAD antara Kota Denpasar dengan Kabupaten Badung Tahun 2009-2013. Hal ini dikarenakan hasil analisis kontribusi pajak daerah pada PAD dari kedua Kabupaten tersebut terdapat kesenjangan yang cukup jauh. Rata-rata analisis kontribusi pajak daerah pada PAD Kota Denpasar sebesar 74% tetapi untuk Kabupaten Badung sebesar 88%.

Saran yang diberikan berdasarkan atas kesimpulan yang telah disampaikan dalam penelitian ini adalah pemungutan pajak daerah dapat dikatakan sudah sangat efektif, akan tetapi Dinas Pendapatan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung tetap harus melakukan evaluasi kembali. Supaya dapat diketahui apakah target yang ditetapkan sudah sesuai dengan potensi riil yang terjadi di lapangan sehingga segala aktivitas pengelolaan dari hasil penerimaan pajak daerah berkontribusi secara optimal pada Pendapatan Asli Daerah masing-masing.

Rata-rata dari tingkat kontribusi pemungutan pajak daerah pada PAD Kota Denpasar dan Kabupaten Badung dikategorikan dalam kondisi sangat baik, sehingga akan lebih baik kondisi ini harus tetap dipertahankan dengan cara meningkatkan pengawasan dan lebih meningkatkan pemantauan secara lebih spesifik lagi pada penerimaan pajak daerah baik oleh Pemerintah Kota Denpasar maupun Kabupaten Badung. Agar dapat lebih meningkatkan kontribusinya terhadap PAD Kota Denpasar dan Kabupaten Badung dalam rangka mewujudkan otonomi daerah.

## REFERENSI

- Adelina, Rima. 2011. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan PBB di Kabupaten Gresik. *Jurnal Online Universitas Negeri Surabaya*, Vol 1. <http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/emba/article/download/1737/1379>. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2014.
- Anggraeni, Dini. 2012. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2010 dan 2011 (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman). Tugas Akhir Universitas Negeri Yogyakarta.
- Aragon, Fernando. 2009. The Flypaper Effect Revisited. *Economic Organization And Publik Policy Research. Journal Sticerd London Of School Of Economic*.4.

- Dicker, James. 2010. How Should We Measure Public Sector Performance? Viewpoint Paper For The 2020 Public Service Trust. *2020 Article Public Services Trust At The RSA*.
- Dore, J and J, Woodhill. 1999 : Regionalism, Sustainable Regional Development (Executive Summary of the Final Report), Greening Australia, p.15-18.
- Gouveia, Miguel & Robert P. Strauss. 1994. Effective Federal Individual Income Tax Function: An Exploratory Empirical Analysis. *National Tax Journal*, Vol.47,(2), pp: 317-339.
- Hoque, Zahirul And Adams. 2008. *Measuring Public Performance: A Study Of Government Departements In Australia*. ISBN 978-1-876874-46-9.
- Kesek, Feisly. 2013. Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. *Jurnal Emba*, Vol 1. No. 4.
- Litvack, J & Seddon. 1998, Decentralisation Briefing Notes, *World Bank Institute, Working papers in collaboration with Prem Network*, (on line), available at: [www.gtzsfdm.or.id/lib\\_pa\\_doc\\_on\\_dec.htm](http://www.gtzsfdm.or.id/lib_pa_doc_on_dec.htm).
- Norregaard, John. 2013. Taxing Immovable Property: Revenue Potential and Implementation Challenges. *IMF Working Paper*, 13(129).
- Poulson, Barry W. And Jules Gordon Kaplan. 2008. State Income Taxes and Economic Growth. *Cato Journal*, Vol 28, No. 1, pp: 53-71.